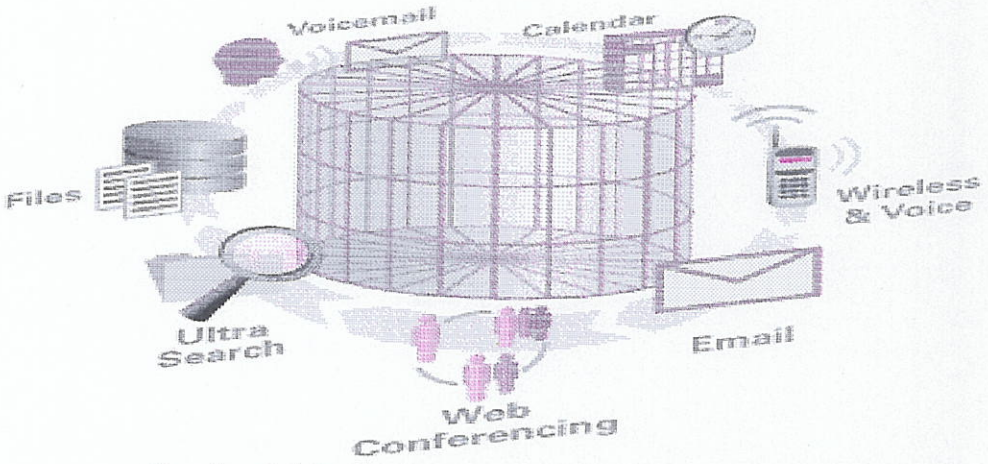
BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah(BPLHD) adalah sebuah perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup yang bertugas melaksanakan kewenangan provinsi di bidang pengendalian lingkungan hidup meliputi pembinaan, pengkoordinasian dan pengkajian AMDAL, sarana dan prasarana teknologi, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan serta pelayanan teknis administrasi kesekretariatan.

Dengan adanya Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah di Provinsi Jawa Barat ini dapat memantau segala bentuk dari perubahan lingkungan yang kurang baik menjadi lebih baik dan tertata rapi dan bersih dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang dapat menunjang keefektifan kerja perusahaan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah sehingga mampu menganalisis mengenai dampak lingkungan.



Gambar 3.1 Perkembangan Sistem Ideal yang akan dibangun

2.1 Tempat Dan Kedudukan Perusahaan

Perusahaan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah(BPLHD) Provinsi Jawa Barat ini bertempat di JLn.Naripan No.25 Bandung yang memiliki Tujuh lantai dari keseluruhan gedung dan memiliki tempat parkir dan motor yang berada di belakang dan depan gedung.Perusahaan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah ini merupakan kantor pusat Provinsi Jawa Barat.

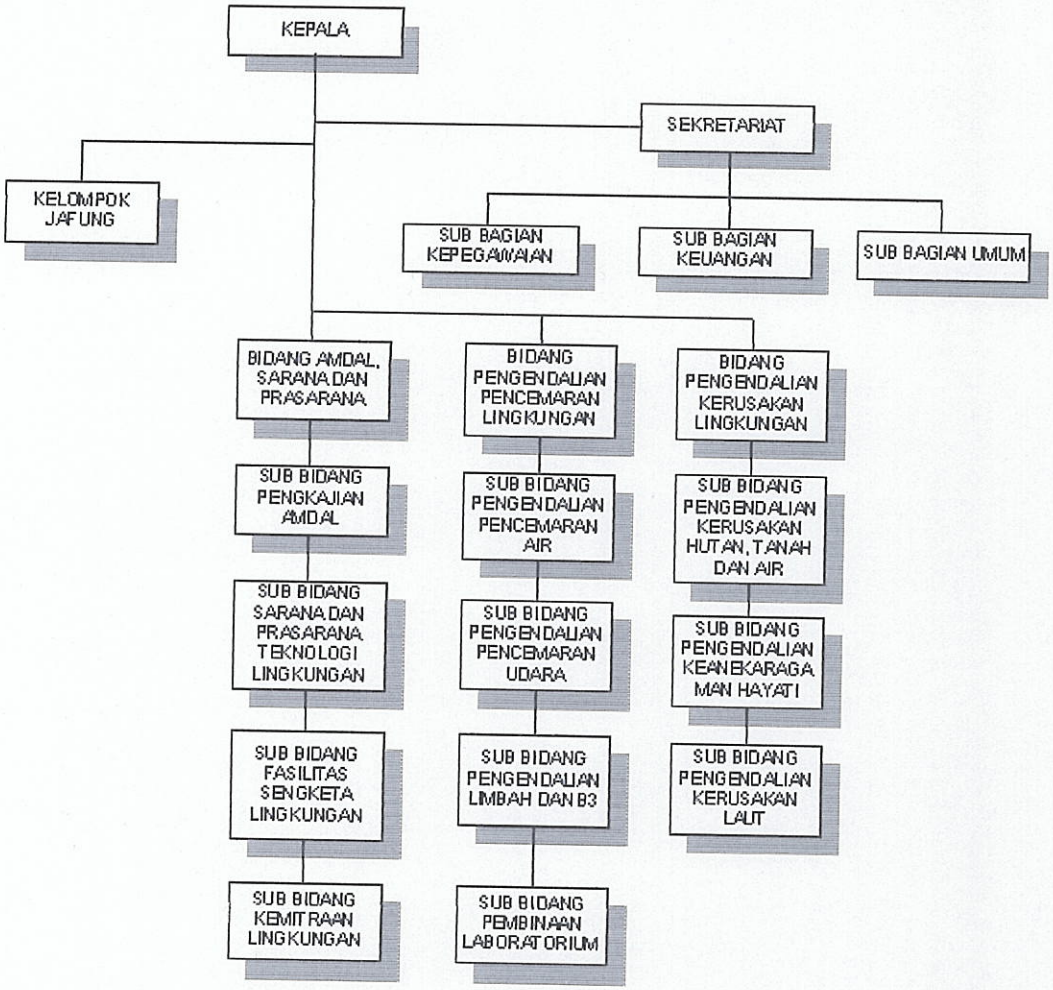
3.3 Visi Dan Misi Perusahaan

Perusahaan Badan Pengendalain Lingkungan Hidup Daerah ini memiliki visi: "Handal dalam pengendalian lingkungan hidup ".Latar belakang adanya visi ini dilandasi dengan pemikiran bahwa :

Lingkungan hidup merupakan permasalahan yang terintegrasi dengan semua sektor yang saling terkait dan BPLHD Propinsi Jawa Barat selaku badan yang berfungsi steering tidak rowing walau dalam fungsi cenderung memiliki kewenangan pemantauan, namun kaitan dengan produk hukum yang ada relatif minim,dengan demikian harus mampu mengkoordinasikan kepentingan manajemen lingkungan hidup secara menyeluruh dalam konteks koordinasi, fasilitas dan kemitraan yang setara dengan pihak terkait.

Strategi dalam mengatasi keterbatasan dalam kewenangan dan permasalahan lingkungan hidup yang sudah pada tingkat yang sulit ditoleransi, maka dituntut kehandalan lembaga dan aparat serta seluruh stakeholder untuk dapat menjalankan fungsi tugasnya dengan kesiapan dan kemampuan, kesungguhan dalam melaksanakan kewenangan serta fungsinya.

3.6 Struktur Organisasi Badan Pengendalian lingkungan Hidup Daerah



Gambar 3.2 Struktur Organisasi

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah

(BPLHD).

Keterangan:

1. Kepala

Bertanggung jawab secara umum atas segala kegiatan yang ada di Struktur organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat. Memimpin,mengarahkan dan mengkoordinasikan semua fungsi yang dibawahinya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.Membuat kebijakan dan keputusan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dalam mencapai efisiensi dan efektifitas kerja.Meminta pertanggung jawaban dari kegiatan operasional secara keseluruhan kepada bagian dibawahnya.Memberikan saran, arahan bimbingan dan teguran, peringatan dan penonaktifan karyawan jika melakukan penyelewengan atau tindakan indisipliner atau bertindak diluar ketentuan AD/ART yang telah ditetapkan, yang diajukan oleh staf pengurus dengan terlebih dahulu melalui musyawarah.

2. Sekretariat

Bertanggung jawab atas kelangsungan kegiatan koordinasi, fasilitas dan pembinaan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup di Jawa Barat.Memimpin, mengarahkan, menggerakan dan mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan bidang kepegawaian, keuangan dan bagian umum secara keseluruhan.Bertanggung jawab terhadap permasalahan di bidang administrasi.

3. Kelompok jafung

Bertanggung jawab dalam masalah-masalah spesifik yang berkaitan dengan fungsi dalam menangani lingkungan hidup daerah jawa barat.

4. Sub bagian kepegawaian.Bertanggung jawab atas administrasi para pekerja, baik MSDM maupun tata kerja yang ada di BPLHD Jawa Barat.

5.Sub bagian keuangan.

Bertanggung jawab dalam hal keuangan yang beredar di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat baik uang yang masuk maupun uang yang keluar.

6. Sub bagian umum

Bagain ini berfungsi dalam konteks umum baik yang bersifat teknis maupun non teknis yang terjadi di BPLHD jawa barat.

7. Bidang amdal, sarana dan prasarana

Menangani analisis masalah-masalah yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang terjadi, mengelola sarana dan prasarana yang ada di BPLHD Jawa Barat.

8. Bidang pengendalian pencemaran lingkungan

Menangani dan mengendalikan pencemaran-pencemaran lingkungan yang terjadi di Jawa Barat.

9. Bidang pengendalian kerusakan lingkungan

Menangani dan mengendalikan kerusakan lingkungan yang terjadi di Jawa Barat.

10. Sub bidang pengkajian AMDAL

Mengkaji dan menganalisis dampak-dampak lingkungan yang terjadi.

11. Sub bidang pengendalian pencemaran air

Menangani dan mengendalikan pencemaran air yang terjadi di Jawa Barat.

12. Sub bidang pengendalian kerusakan hutan, tanah dan air

Menangani dan mengendalikan kerusakan hutan, tanah dan air.

13. Sub bidang sarana dan prasarana teknologi lingkungan

Menangani sarana dan prasarana tekologi lingkungan hidup

14. Sub bidang pengendalian pencemaran udara

Menangani pengendalian pencemaran uadara.

15. Sub bidang pengendalian keanekaragaman hayati

Menangani pengendalian keanekaragaman hayati

16. Sub bidang fasilitas sengketa lingkungan

Menangani masalah persengketaan tentang lingkungan.

17. Sub bidang pengendalian limbah dan B3

Menangani pengendalian limbah-limbah industri maupun limbah-limbah rumah tangga.

18. Sub bidang pengendalian kerusakan laut

Menangani pengendalian pengrusakan laut dan daerah sekitar laut.

19. Sub bidang kemitraan lingkungan

Membangun masyarakat yang akrab dengan lingkungan.

20. Sub bidang pembinaan laboratorium

Mengadakan penelitian-penelitian dan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat.

3.7 Bidang Pekerjaan Divisi/Departemen Tempat Kerja Praktek Lapangan

Bidang pekerjaan/Tugas divisi atau departemen tempat kerja praktek adalah sebagai berikut:

- **Pengendalian Kerusakan Lingkungan**

  Mengamati data informasi yang dikirim melalui surat nota dinas ke masing-masing KaSubBag(Kepala Sub Bagian).